

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	x
ABSTRAK (Bahasa Inggris)	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
A. Tinjauan Umum Tentang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah	36

1. Pemerintahan.....	36
2. Otonomi Daerah.....	37
3. Pemerintah Daerah.....	42
4. Dasar Hukum Otonomi Daerah	44
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	46
1. Pengertian Kewenangan	46
2. Sumber-Sumber Kewenangan	48
3. Cara Memperoleh Kewenangan	49
4. Kewenangan Pemerintah Berdasarkan Sifatnya.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	53
1. Kewenangan Pemerintahan Provinsi.....	53
2. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	55
3. Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007	57
D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pertanahan	61
E. Tinjauan Umum Tentang Hak Penguasaan Atas Tanah	68
1. Pengertian Penguasaan Atas Tanah	68
2. Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah	71
3. Asas – Asas Dasar Hukum Tanah Nasional	72
4. Macam – Macam Penguasaan Hak Atas Tanah	73
F. Tinjauan Umum Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara ..	76
1. Pengertian Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara	76

2. Dasar Hukum Pemberian Hak Milik Atas Tanah Negara	77
3. Tata Cara dan Prosedur Pemberian Hak Milik Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	78
G. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah Menurut Islam.....	82
1. Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam	82
2. Cara-cara Memperoleh Kepemilikan Tanah Dalam Islam	93
3. Pemanfaatan Tanah Dalam Islam	96
4. Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Dalam Islam	96
5. Pencabutan Hak Milik atas Tanah	97
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	99
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Penguasaan Tanah Negara	99
B. Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Semarang Terhadap Penguasaan Tanah Negara	117
C. Solusi dari Kelemahan-Kelemahan Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Kota Semarang Terhadap Penguasaan Tanah Negara	129
BAB IV PENUTUP	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN